



No. Katalog: 3305008

LAPORAN INDEKS PERILAKU KETIDAKPEDULIAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2018



BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN INDEKS PERILAKU KETIDAKPEDULIAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2018



**LAPORAN INDEKS PERILAKU KETIDAKPEDULIAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
2018**

Environment Indifferent Behaviour Index Report of Indonesia 2018

ISBN: 978-602-432-210-0

No. Publikasi/*Publication Number*: 04320.1801

Katalog/*Catalog*: 3305008

Ukuran Buku/*Book Size*: 18,2 cm X 25,7 cm (B5 JIS)

Jumlah Halaman/*Number of pages*: xii + 44 halaman

Naskah/*Manuscript*:

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup

Sub Directorate of Environment Statistics

Penyunting/*Editor*:

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup

Sub Directorate of Environment Statistics

Desain Kover Oleh/*Cover Designed by*:

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup

Sub Directorate of Environment Statistics

Penerbit/*Published by*:

© BPS-RI/BPS-Statistics Indonesia

Pencetak/*Printed by*:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi/*Graphics by*: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

TIM PENYUSUN

Pengarah

Harmawanti Marhaeni

Editor

Nona Iriana
Masfufah
Nanik Supriyani

Penulis

Shery Mardiyah

Pengolah Data

Shery Mardiyah

Desain dan Layout

Shery Mardiyah

Sampul

Novita Noor Pragesari

Sumber: debi.online.org.uk

KATA PENGANTAR

Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) merupakan upaya BPS untuk mengukur tingkat ketidakpedulian wilayah di Indonesia terhadap lingkungan hidup. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin tidak peduli terhadap lingkungan. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks berarti wilayah tersebut semakin peduli terhadap lingkungan. Tingkat perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup ini terbatas pada perilaku rumah tangga secara agregat berdasarkan Provinsi di Indonesia mengenai pengelolaan air dan energi, transportasi pribadi, dan pengelolaan sampah.

Indeks ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan yang melibatkan rumah tangga atau individu pada pengelolaan lingkungan serta bermanfaat sebagai tolak ukur *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan.

Disadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan laporan yang akan datang. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan tinggi dan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2018

Direktur Statistik Ketahanan Sosial



Harmawanti Marhaeni, M.Sc
NIP. 19701112 199211 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
BAB II. KAJIAN TEORI	5
2.1. Analisis Faktor	5
2.2. Indikator Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup.....	10
BAB III. METODOLOGI	13
3.1. Sumber Data	13
3.2. Unit Analisis	14
3.3. Tahapan Pembentukan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH)	15
BAB IV. INDEKS PERILAKU KETIDAKPEDULIAN LINGKUNGAN HIDUP (IPKLH)	25
4.1. Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) Indonesia	25
4.2. Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) Indonesia Berdasarkan Provinsi.....	28
4.3. Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) Indonesia Berdasarkan Pulau	30

4.4. Hasil Kajian Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH).....	36
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

3.1	Bobot Indikator Penyusun IPKLH dari Hasil PCA.....	23
4.1	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2017.....	31
4.2	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali, 2017.....	32
4.3	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan, 2017.....	33
4.4	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2017.....	33
4.5	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Nusa Tenggara, 2017.....	34
4.6	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Maluku, 2017.....	35
4.7	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Papua, 2017.....	36

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Pikir IPKLH	11
4.1	Nilai Indeks Berdasarkan Dimensi Penyusun IPKLH di Indonesia	25
4.2	<i>Share</i> dimensi Penyusun IPKLH di Indonesia	26
4.3	Persentase Rumah Tangga di Indonesia Berdasarkan Penanganan Sampah yang Paling Sering Dilakukan, 2017	27
4.4	Persentase Rumah Tangga di Indonesia Berdasarkan Kepedulian Terhadap Sampah Plastik Ketika Berbelanja, 2017.....	28
4.5	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi, 2017	29
4.6	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi, 2017.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Demikian juga sebaliknya, lingkungan dapat dipengaruhi oleh aktivitas dan perilaku manusia. Manusia merupakan subjek utama yang mengambil manfaat dari sumber daya alam untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Namun, posisi manusia sebagai subjek dalam pemanfaatan sumber daya alam terkadang membuat manusia melupakan aspek lain seperti aspek lingkungan. Proses pembangunan seringkali dilakukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan hidup berkelanjutan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.

Permasalahan lingkungan sejatinya ditimbulkan dari ulah manusia yang kurang peduli terhadap keseimbangan dan keharmonisan lingkungan. Ketidakpedulian tersebut disebabkan oleh manusia yang cenderung mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga hal itu dapat menyebabkan terganggunya keserasian lingkungan. Lalu, menurut pandangan holistik, manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut disebabkan ketergantungan manusia terhadap lingkungan dalam menunjang kehidupannya, serta lingkungan hidup memiliki peran besar sebagai penyedia kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia harus peduli dalam memelihara dan menjaga lingkungannya (Malik dalam Kutanegara, 2014).

Untuk mendukung perilaku kepedulian penduduk terhadap lingkungan, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan terkait perilaku penduduk untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 tentang Kepedulian Masyarakat terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
4. Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Air Tanah.

Berbagai peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan untuk mengatur atau mendorong masyarakat agar berperilaku peduli terhadap lingkungan hidup. Namun, belum ada alat ukur yang mampu mengetahui bagaimana hasil penerapan peraturan tersebut terhadap perilaku penduduk Indonesia. Dengan demikian, diperlukan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian dari berbagai peraturan serta kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup yang telah dijalankan selama ini.

Sebagai instansi yang memelopori data statistik terpercaya untuk semua, sudah menjadi tugas dari Badan Pusat Statistik khususnya Subdirektorat Lingkungan Hidup untuk menyediakan suatu ukuran mengenai tingkat perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup di Indonesia yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan pemerintah terkait peningkatan kepedulian terhadap lingkungan. Setiap tiga tahun sekali Badan Pusat Statistik mengadakan Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahanan Sosial (Susenas Modul Hansos). Survei ini mengumpulkan keterangan rumah tangga ataupun individu salah satunya mengenai lingkungan hidup yang

meliputi perilaku rumah tangga yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak bagi lingkungan hidup. Perilaku rumah tangga yang diamati dibagi ke dalam beberapa blok atau dimensi yang nantinya akan digunakan dalam menghitung tingkat ketidakpedulian terhadap lingkungan yaitu penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, dan pengurangan polusi udara (transportasi pribadi). Hasil analisis mengenai dimensi-dimensi tersebut disajikan dalam “Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH)”.

Secara umum, IPKLH bertujuan mengukur tingkat ketidakpedulian suatu wilayah di Indonesia terhadap lingkungan hidup. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin tidak peduli terhadap lingkungan. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks berarti wilayah tersebut semakin peduli terhadap lingkungan. Tingkat perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup ini terbatas pada perilaku rumah tangga secara agregat berdasarkan Provinsi di Indonesia mengenai pengelolaan air dan udara, penggunaan energi (transportasi pribadi), dan pengelolaan sampah terkait perilaku peduli lingkungan tersebut. Indeks ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan dan tolak ukur *monitoring* serta evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penghitungan IPKLH ini yaitu:

1. Menghasilkan suatu nilai yang akan digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpedulian provinsi-provinsi di Indonesia
2. Mengetahui dimensi yang paling dominan dalam perilaku ketidakpedulian terhadap lingkungan

BAB 2 KAJIAN TEORI

2.1 Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan suatu metode analisis statistik multivariat yang memiliki kegunaan utama untuk mereduksi data. Metode statistik ini digunakan untuk mengukur inter-relasi antar beberapa variabel teramati dan kemudian menjelaskan variabel-variabel teramati tersebut dalam bentuk dimensi inti (dikenal sebagai 'faktor'). Dengan menggunakan analisis faktor maka dapat diidentifikasi dimensi-dimensi terpisah yang diukur dari data tersebut dan menentukan sebuah pembobot faktor (*factor loading*) bagi setiap variabel teramati dalam suatu faktor (Hair dkk., 1998).

Menurut J. Supranto (2010), analisis faktor dapat digunakan dalam situasi yakni:

1. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi yang lebih sedikit jumlahnya untuk menggantikan suatu set variabel asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariat selanjutnya, misalnya analisis regresi berganda.
2. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan di dalam analisis multivariat selanjutnya.
3. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari (*underlying dimensions*) atau faktor, yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel sehingga menganalisis faktor berarti mereduksi data atau variabel.

Secara matematis keterkaitan antara variabel teramati dan faktor dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut. Sekumpulan variabel teramati yang dinotasikan dengan vektor acak $X = \{X_1, X_2, \dots, X_p\}$, masing-masing mempunyai rata-rata (μ_i) atau vektor rata-rata μ dan

matriks varians Σ , secara linier variabel teramati tersebut bergantung pada sejumlah faktor F_1, F_2, \dots, F_m dan sejumlah error $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_p$.

$$\begin{aligned} X_1 - \mu_1 &= l_{11}F_1 + l_{12}F_2 + \dots + l_{1m}F_m + \varepsilon_1 \\ X_2 - \mu_2 &= l_{21}F_1 + l_{22}F_2 + \dots + l_{2m}F_m + \varepsilon_2 \\ &\vdots \\ X_p - \mu_p &= l_{p1}F_1 + l_{p2}F_2 + \dots + l_{pm}F_m + \varepsilon_p \end{aligned}$$

Keterangan:

μ_i = rata-rata dari variabel ke-i ; $i = 1, 2, \dots, p$.

F_j = faktor umum (*common factor*) ke-j ; $j = 1, 2, \dots, m$.

ε_i = faktor khusus (*specific faktor*) yaitu faktor yang menampung informasi yang tidak masuk ke dalam model (*error*).

l_{ij} = pembobot (*loading*) dari variabel ke-i pada faktor ke-j.

Persamaan tadi dapat dinotasikan dalam bentuk matriks berikut:

$$X_{p \times 1} - \mu_{p \times 1} = L_{p \times m} F_{m \times 1} + \varepsilon_p$$

Tahapan Analisis Faktor

Adapun tahapan-tahapan dalam analisis faktor yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tabulasi data pada *data view*

Proses untuk memasukkan data kedalam bentuk tabel yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut dengan SPSS.

2. Pembentukan atau pemeriksaan matriks korelasi

Matriks korelasi merupakan matriks yang memuat koefisien korelasi dari semua pasangan variabel dalam penelitian. Dalam tahap ini, ada dua pengujian asumsi yang perlu dilakukan agar analisis faktor dapat dilaksanakan (Hair, dkk: 2006), yaitu :

- a. *Bartlett Test of Sphericity*, yang digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antar variabel, sehingga

variabel yang diteliti tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Tahapan pengujiannya sebagai berikut:

1) Hipotesis

$H_0 : \rho = I_{p \times p}$ (matriks korelasi merupakan matriks identitas)

$H_1 : \rho \neq I_{p \times p}$ (matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas)

2) Taraf uji yang digunakan yaitu 5%

3) Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\chi^2_{hitung} = - \left[(n-1) - \frac{2p+5}{6} \right] \ln |R|$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

p : jumlah variabel

R : determinan matriks korelasi

4) Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan

χ^2_{hitung} dengan $\chi^2_{\alpha, p(p-1)/2}$. Tolak H_0 apabila $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{\alpha, p(p-1)/2}$ atau ketika $p_{value} < \alpha$.

b. Ukuran kelayakan data, yang ditinjau dengan *Keiser-Meyers-Oklin* (KMO) dan *Measure of Sampling Adequate* (MSA). Penilaian KMO untuk analisis faktor adalah sebagai berikut (Kaiser dan Rice (1974) dalam Hair, 1988):

a. $0,90 \leq KMO < 1,00$ data sangat baik

b. $0,80 \leq KMO < 0,90$ data baik

c. $0,70 \leq KMO < 0,80$ data cukup baik

d. $0,60 \leq KMO < 0,70$ data lebih dari cukup

e. $0,50 \leq KMO < 0,60$ data cukup

f. $KMO < 0,5$ data tidak layak

Nilai KMO digunakan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel yang apabila kurang dari 0,5 maka perlu peninjauan ulang

variabel. Sedangkan MSA digunakan untuk melihat kelayakan variabel, jika bernilai: 0,8 atau lebih, dapat dipercaya; 0,7 atau lebih, sedang; 0,6 atau lebih, cukup; 0,5 atau lebih, kurang memuaskan; dan dibawah 0,5, tidak dapat digunakan. Nilai MSA yang kurang dari 0,5 harus dihilangkan dari analisis faktor satu per satu dengan memilih nilai MSA yang terkecil (Han, dkk., 2012).

3. Ekstraksi faktor

Proses untuk mereduksi faktor-faktor yang kita teliti menjadi beberapa faktor yang diduga dapat menjelaskan faktor-faktor lainnya secara signifikan. Besarnya pengaruh akan dimunculkan dalam tabel *communalities* dalam kolom *extraction*.

Untuk menghasilkan sejumlah faktor dari *dataset* yang ada, analisis faktor melakukan ekstraksi faktor dengan menggunakan salah satu metode ekstraksi antara lain: *principal components*, *unweighted least squares*, *generalized least squares*, *maximum likelihood*, *principal axis factoring*, *alpha factoring*, atau *image factoring*. Penelitian ini sendiri menggunakan '*principal component analysis*' dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menemukan sebuah kombinasi linier beberapa variabel teramati (sebuah faktor) yang menggambarkan secara maksimal variasi-variasi yang ada pada variabel-variabel teramati asli (*original observed variables*).
- b. Menemukan faktor lain yang menggambarkan secara maksimal variasi-variasi pada variabel-variabel teramati yang masih tersisa dimana faktor ini tidak berkorelasi dengan faktor yang sebelumnya telah dibentuk
- c. Proses ini dilakukan secara berturut-turut sampai ditemukan sejumlah faktor maksimum sebanyak jumlah variabel teramati asli.

Biasanya jumlah faktor yang terbentuk dari hasil ekstraksi data lebih sedikit dari jumlah variabel teramati asli yang ada pada data. Faktor yang terbentuk tadi dapat digunakan untuk menggantikan variabel-variabel teramati asli bagi keperluan analisis statistik lebih lanjut. Dengan demikian, analisis faktor sering digunakan untuk mereduksi jumlah variabel teramati pada data (Ho, 2006).

4. Rotasi faktor

Metode untuk merotasikan faktor yang terbentuk sehingga konsep yang direpresentasikan oleh faktor tersebut menjadi lebih mudah diinterpretasikan maknanya. Pada rotasi faktor, matriks faktor ditransformasikan ke dalam matriks yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah diinterpretasikan.

Dalam analisis ini rotasi faktor dilakukan dengan metode rotasi *varimax*. Rotasi *varimax* adalah rotasi *orthogonal* yang membuat jumlah varian faktor *loading* dalam masing-masing faktor akan menjadi maksimum, dimana nantinya peubah asal hanya akan mempunyai korelasi yang tinggi dan kuat dengan faktor tertentu saja (korelasinya mendekati 1).

Interpretasi hasil kemudian dilakukan dengan melihat faktor *loading*. Faktor *loading* adalah angka yang menunjukkan besarnya korelasi antara suatu variabel dengan faktor satu, faktor dua, faktor tiga, faktor empat atau faktor lima yang terbentuk. Proses penentuan pengelompokan variabel selanjutnya sama seperti sebelum dilakukannya rotasi, yaitu dengan melakukan perbandingan besar faktor *loading* pada setiap baris di dalam setiap tabel.

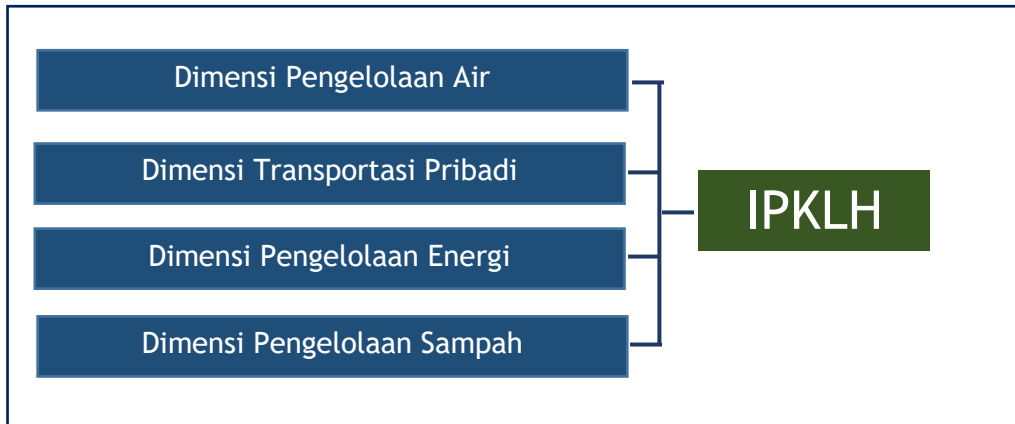
2.2 Indikator Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup

Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA) adalah departemen pemerintah yang bertanggung jawab tentang perlindungan lingkungan, produksi pangan dan standar pangan, pertanian, perikanan, dan komunitas desa di Inggris. DEFRA berfokus pada perilaku yang akan berdampak pada penghematan emisi karbon sehingga dapat terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Salah satu penelitian DEFRA adalah mengukur perilaku peduli lingkungan pada tahun 2008. Tujuan adanya penelitian tersebut adalah untuk melindungi dan mengembangkan lingkungan dengan meningkatkan kontribusi perilaku peduli lingkungan dari individu maupun komunitas. Kerangka kerja DEFRA terdiri dari lima dimensi yaitu:

1. Transportasi pribadi, yang disusun dari penggunaan kendaraan secara efisien, tidak menggunakan mobil untuk perjalanan jarak dekat, dan menghindari penerbangan yang tidak penting (perjalanan pendek).
2. Pengelolaan sampah, yang disusun dari meningkatkan daur ulang, tidak membuang-buang makanan.
3. Pengelolaan energi, yang terdiri dari mengisolasi listrik, manajemen energi yang lebih baik, dan memasang *microgeneration*.
4. Pengelolaan air, yaitu penggunaan air yang lebih bertanggungjawab.
5. *Eco-product*, yang terdiri dari: membeli produk hemat energi, memakan makanan yang sedang musim, dan mencanangkan menu makanan yang ramah lingkungan.

Berdasarkan kerangka kerja DEFRA dan menyesuaikan dengan data yang tersedia, dibentuk empat dimensi utama. Dimensi tersebut antara lain dimensi pengelolaan air, transportasi pribadi (pengurangan polusi udara), pengelolaan energi, dan pengelolaan sampah, terkait perilaku peduli lingkungan dengan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir IPKLH



BAB III METODOLOGI

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahanan Sosial 2017 (Susenas Modul Hansos 2017). Susenas Modul Sosial merupakan survei rutin tiga tahunan yang dilakukan oleh BPS. Survei ini bertujuan untuk menyediakan data statistik bidang ketahanan sosial seperti modal sosial, partisipasi politik, kekerasan dalam rumah tangga, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Cakupan dalam survei ini meliputi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada penghitungan IPKLH ini indikator yang digunakan untuk penghitungan berasal dari Kuesioner Susenas Modul Hansos Blok VIII, IXA, IXB, IXC, dan IXD mengenai lingkungan hidup. Berikut merupakan pertanyaan yang diambil dari masing-masing blok dalam kuesioner Susenas Modul Hansos 2017

- Blok VIII : Keterangan Perumahan
 - R803A : Jumlah lampu listrik yang terpasang di rumah
 - R803B : Jumlah lampu hemat energi yang terpasang di rumah

- Blok IXA : Penghematan Energi
 - R901 : Seberapa sering menutup panci pada saat merebus masakan (masak air, sayur, dll)
 - R902 : Dalam sebulan terakhir seberapa sering rumah tangga mematikan lampu (listrik dan non listrik) ketika tidak digunakan
 - R903 : Di saat siang hari yang cerah, apakah rumah tangga memanfaatkan pencahayaan dari sinar matahari untuk penerangan ruangan
 - R904AK3: Seberapa sering rumah tangga membiarkan televisi menyala meskipun tidak digunakan.
 - R906A : Ketika membeli alat-alat elektronik, seberapa sering mempertimbangkan alasan daya listrik rendah

- Blok IXB : Pengelolaan Sampah
 - R907 : Seberapa sering rumah tangga melakukan pemilahan sampah basah (mudah membusuk) dan sampah kering (tidak mudah membusuk)
 - R908B : Perlakuan yang paling sering terhadap sampah
 - R910 : Apa yang biasanya rumah tangga lakukan pada barang bekas layak pakai (seperti: baju bekas, sepatu bekas, perkakas, dll)

- Blok IXC : Penghematan Air
 - R913 : Bagaimana kebiasaan rumah tangga dalam membilas pakaian
 - R914 : Bagaimana penggunaan air untuk mencuci alat makan/minum rumah tangga
 - R915 : Seberapa sering rumah tangga memanfaatkan air bekas (cuci sayur/buah/beras, wudhu, dll) untuk keperluan lain
 - R916 : Seberapa sering rumah tangga lupa/membiarkan air mengalir ketika tidak digunakan

- Blok IXD : Pengurangan Polusi Udara
 - R919B : Apakah pertimbangan rumah tangga dalam memilih kendaraan bermotor
 - R920b : Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam pembentukan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) yaitu provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Total Provinsi yang dianalisis berjumlah 34 Provinsi

3.3 Tahapan Pembentukan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH)

Berikut merupakan tahapan pembentukan IPKLH:

1. Membentuk Dimensi dan Menyusun Indikator

Dimensi yang digunakan pada IPKLH ini sebanyak empat dimensi sesuai dengan penjelasan pada kajian teori. Terdapat empat dimensi utama yang akan digunakan yaitu pengelolaan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), penggunaan energi, dan pengelolaan sampah.

- a. Dimensi pengelolaan Air
 - Mencuci pakaian (R913)
 - Mencuci alat makan (R914)
 - Penggunaan air bekas (R915)
 - Perlakuan terhadap air mengalir ketika tidak digunakan (R916)
- b. Dimensi Transportasi Pribadi
 - Sarana angkutan (R507)
 - Pertimbangan dalam membeli kendaraan bermotor (R919)
 - Mengurangi kendaraan bermotor (R920B)
- c. Dimensi Pengelolaan Energi
 - Penggunaan lampu hemat energi (R803B)
 - Menutup panci (R901)
 - Mematikan lampu (R902)
 - Memanfaatkan cahaya matahari (R903)
 - Penggunaan TV (R904A_K3)
 - Alasan pembelian alat elektronik dengan daya rendah (R906A)
- d. Dimensi Pengelolaan Sampah
 - Pemilihan sampah (R907A)
 - Penanganan terhadap sampah (R908B)
 - Perlakuan terhadap barang bekas (R910)
 - Membawa tas belanja sendiri (R911)

2. Me-Record Ulang Indikator Sehingga Menjadi Indikator yang Diinginkan

Beberapa indikator yang tersedia memerlukan *record* ulang agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan penghitungan IPKLH. Terdapat 9 indikator yang dilakukan *record* ulang yaitu :

a. Dimensi Pengelolaan Air terdiri dari:

- Mencuci pakaian (R913)

Pada indikator ini dari 3 buah pertanyaan (R913A-C) dibentuk menjadi dua kategori yaitu mencuci pakaian dengan menghemat dan tidak menghemat air. Mencuci pakaian dengan menghemat air apabila jawaban dari responden pada pertanyaan mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci satu tabung bukaan depan, tanpa mesin cuci dengan air ditampung kurang dari dua kali atau tidak mencuci pakaian di rumah (*sungai/laundry*). Sementara mencuci pakaian dengan tidak menghemat air apabila jawaban dari responden mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci satu/dua tabung bukaan atas atau tanpa mesin cuci dengan air ditampung minimal dua kali

b. Dimensi Transportasi Pribadi

- Sarana angkutan (R507)

Pada indikator ini dari 5 buah jawaban dibentuk menjadi dua kategori yaitu penggunaan sarana angkutan yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Penggunaan sarana angkutan yang ramah lingkungan yaitu apabila responden menjawab tidak menggunakan kendaraan, menggunakan kendaraan tidak bermotor, dan menggunakan kendaraan bermotor umum rute tertentu untuk menuju ke tempat kegiatan. Sementara penggunaan sarana tidak ramah lingkungan yaitu apabila responden menjawab menggunakan

kendaraan bermotor pribadi atau kendaraan bermotor umum tidak berute.

- Pertimbangan dalam membeli kendaraan bermotor (R919)

Pada indikator ini akan dibentuk dua kategori jawaban yaitu membeli kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan ramah lingkungan dan tanpa pertimbangan ramah lingkungan. Membeli kendaraan dengan mempertimbangkan ramah lingkungan yaitu dengan mempertimbangkan hemat bahan bakar atau ramah lingkungan saat membeli kendaraan.

c. Dimensi Pengelolaan Energi

- Penggunaan lampu hemat energi (R803B)

Pada indikator ini data jumlah lampu hemat energi yang digunakan diubah menjadi proporsi lampu hemat energi yang digunakan oleh rumah tangga.

d. Dimensi Pengelolaan Sampah

- Penanganan terhadap sampah (R908B)

Pada indikator ini dari 10 buah jawaban dibentuk menjadi dua kategori yaitu menangani sampah dengan ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Menangani sampah dengan ramah lingkungan yaitu apabila responden menjawab penanganan sampah dengan diangkut petugas, dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), didaur ulang, dibuat kompos/pupuk, dan disetor ke bank sampah.

3. Imputasi Data

Imputasi dilakukan pada *missing* data yang terdapat pada variabel

- Penggunaan lampu hemat energi (R803B)
- Menutup panci (R901)
- Penggunaan TV (R904A_K3)

- Alasan pembelian alat elektronik dengan daya rendah (R906A)
- Mencuci alat makan (R914)
- Pertimbangan dalam membeli kendaraan bermotor (R919)
- Mengurangi kendaraan bermotor (R920B)

Adapun langkah-langkah imputasi yaitu sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata (*mean*) wilayah berdasarkan unit wilayah terkecil (Blok Sensus (BS), Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)
- b. Menginput *missing* data dari unit wilayah terkecil sampai terbesar. Skema: *missing* > input mean BS > masih ada *missing* > input *mean* Desa > dst.
- c. Apabila ada bilangan berkoma pada nilai mean maka dilakukan pembulatan seperti kaidah matematika.

4. Mengubah Data Berskala Ordinal Menjadi Rasio

Metode analisis yang digunakan pada dalam penghitungan IPKLH membutuhkan data minimal berskala interval sementara data yang tersedia dari Modul Hansos berskala ordinal. Oleh karena itu dilakukan transformasi data yang akan digunakan menjadi persentase rumah tangga yang tidak peduli lingkungan terhadap indikator yang akan digunakan perprovinsi. Data yang digunakan pada pengolahan dalam bentuk persentase sehingga penamaan indikator juga berubah menjadi:

a. Dimensi Pengelolaan Air

- Persentase rumah tangga yang tidak menghemat air ketika mencuci pakaian (jawaban responden mencuci menggunakan mesin cuci satu/dua tabung bukaan atas, atau tanpa mesin cuci air ditampung lebih dari 2 kali bilas atau air mengalir)

- Persentase rumah tangga yang mencuci alat makan dengan air mengalir
 - Persentase rumah tangga yang tidak memanfaatkan air bekas (jawaban R915 kadang-kadang atau tidak pernah)
 - Persentase rumah tangga yang membiarkan air mengalir ketika tidak digunakan (jawaban R916 selalu atau sering)
- b. Dimensi Pengurangan Transportasi Pribadi
- Persentase rumah tangga yang menggunakan kendaraan tidak ramah lingkungan (jawaban R507 menggunakan kendaraan bermotor pribadi atau kendaraan bermotor umum tidak berute)
 - Persentase rumah tangga yang membeli kendaraan bermotor tanpa pertimbangan lingkungan (jawaban R919 selain alasan hemat bahan bakar atau ramah lingkungan)
 - Persentase rumah tangga yang tidak mengurangi kendaraan bermotor dalam setahun terakhir (R920B)
- c. Dimensi Pengelolaan Energi
- Rata-Rata proporsi lampu hemat energi terhadap jumlah lampu yang dipasang
 - Persentase rumah tangga yang tidak menutup panci saat memasak
 - Persentase rumah tangga yang jarang mematikan lampu ketika tidak digunakan (jawaban R902 selalu dan atau sering)
 - Persentase rumah tangga yang memanfaatkan Cahaya Matahari untuk sebagian kecil ruangan (Jawaban R903 sebagian kecil ruangan dan tidak memanfaatkan)
 - Persentase rumah tangga yang membiarkan tv menyala ketika tidak digunakan (jawaban R904A_K3 selalu atau sering)

- Persentase rumah tangga yang jarang membeli alat elektronik dengan alasan daya rendah (jawaban R906A kadang-kadang atau tidak pernah)

d. Dimensi Pengelolaan Sampah

- persentase rumah tangga yang tidak melakukan pemilihan sampah basah dan kering (jawaban R907A kadang-kadang atau tidak)
- Persentase rumah tangga yang menangani sampah tidak ramah lingkungan (jawaban R908B dibuang ke sungai/got/selokan, dibakar, ditimbun/dikubur, dibuang sembarangan, atau lainnya)
- Persentase rumah tangga yang tidak memanfaatkan barang bekas
- Persentase rumah tangga yang tidak membawa tas belanja sendiri

5. Penentuan Bobot Dimensi dan Indikator

Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) merupakan indeks komposit tertimbang dari 11 indikator yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat ketidakpedulian suatu wilayah terhadap lingkungan hidup. Setiap indikator harus memiliki kontribusi terhadap IPKLH. Besarnya kontribusi setiap indikator menggambarkan besarnya pengaruh tersebut terhadap dimensi dan IPKLH. Besarnya kontribusi pada setiap indikator pada masing-masing dimensi tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran menggunakan teknik statistik yang besarnya cenderung tidak sama antar indikator. Sementara kontribusi pada setiap dimensi menggunakan nilai yang sama (*equal*) dalam membentuk IPKLH.

Sebelum dilakukan pengolahan data dengan metode *Principal Component Analysis* (PCA), dimana dihasilkan total 11 indikator (Dimensi Pengelolaan Air: 4, Dimensi Pengelolaan Energi: 3, Dimensi Transportasi Pribadi 2, dan Dimensi Pengelolaan Sampah: 2), kandidat indikator pada awalnya adalah sebanyak 17 buah (Dimensi Pengelolaan Air: 4, Dimensi Pengelolaan Energi: 6, Dimensi Transportasi Pribadi: 3, dan Dimensi Pengelolaan Sampah: 4). Dalam proses menghasilkan model PCA yang optimum (memenuhi persyaratan PCA) dilakukan proses kalkulasi statistik secara berurutan sebanyak 4 tahap untuk dimensi Energi, 2 Tahap untuk Dimensi Transportasi, 3 tahap untuk dimensi sampah, dan satu kali proses untuk Dimensi Air.

Model PCA digunakan dengan mempertimbangkan bahwa metode statistik tersebut dapat digunakan untuk mereduksi jumlah indikator dan bobot yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah statistik. Penimbang setiap indikator penyusun IPKLH dalam setiap dimensi dihitung berdasarkan *loading factor* yang dihasilkan dari masing-masing model PCA dalam setiap dimensi yang paling optimum. Pertimbangan pemilihan metode PCA ini dalam penyusunan IPKLH yaitu agar diperoleh suatu angka sederhana untuk keperluan analisis tingkat perilaku ketidakpedulian wilayah di Indoensia, dengan menjaga keragaman dalam komponen penyusunnya, sehingga bias indeks yang dibentuk bisa dikurangi.

1. Tahap 1. Identifikasi Indikator dalam Setiap Dimensi

Untuk menghasilkan susunan faktor (model) yang merepresentasikan IPKLH yang valid secara statistik maka dilakukan beberapa tahapan penghitungan faktor secara berulang (*iterative*) dan berurutan (*sequensial*). Kriteria yang diperhatikan untuk menilai bahwa susunan faktor yang dihasilkan lebih representatif.

2. Tahap 2. Pengukuran Kontribusi Indikator

Bobot setiap indikator dalam suatu dimensi dihitung berdasarkan susunan optimal pembentuk IPKLH. Bobot setiap indikator dihitung berdasarkan nilai *loading factors* yang dimiliki oleh indikator tersebut serta nilai *rotation sums of squared loading (% of variance)* melalui 2 tahap.

- a. Penghitungan bobot tiap indikator dalam satu dimensi dengan formula

$$Bobot_i = \frac{Loading\ factor_i}{Total\ loading_i} \times \frac{\% \ of\ variance_i}{100}$$

Dimana:

$$Total\ loading = \sum loading\ factor_i$$

- b. Penghitungan kontribusi/bobot standar tiap indikator dalam satu dimensi dengan formula

$$Bobot\ Standar_i = \frac{Bobot_i}{\sum Bobot}$$

Selanjutnya nilai kontribusi setiap indikator digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing indikator dalam setiap dimensi untuk menghasilkan IPKLH. Besarnya penimbang setiap indikator yang digunakan untuk menyusun IPKLH pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Bobot Indikator Penyusun IPKLH dari Hasil PCA

Dimensi	Indikator	Bobot Standar
PENGELOLAAN AIR (0.25)	Persentase rumah tangga yang tidak menghemat air ketika mencuci pakaian	0.19553004
	Persentase rumah tangga yang mencuci alat makan dengan air mengalir	0.445297906
	Persentase rumah tangga yang jarang memanfaatkan air bekas	0.200731147
	Persentase rumah tangga membiarkan air mengalir walaupun tidak digunakan.	0.158440907
PENGELOLAAN ENERGI (0.25)	Rata-Rata proporsi lampu hemat energi	0.302149512
	Persentase rumah tangga yang jarang mematikan lampu ketika tidak digunakan	0.316752581
	Persentase rumah tangga yang memanfaatkan cahaya matahari untuk sebagian kecil ruangan	0.381097907
TRANSPORTASI PRIBADI (0.25)	Persentase rumah tangga yang menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju ke tempat kegiatan utama	0.5
	Persentase rumah tangga yang membeli kendaraan tanpa mempertimbangkan sisi lingkungan	0.5
PENGELOLAAN SAMPAH (0.25)	Persentase rumah tangga yang menangani sampah dengan tidak ramah lingkungan	0.5
	Persentase rumah tangga yang tidak membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja	0.5

6. Penghitungan IPKH

Untuk menghitung IPKLH, terlebih dahulu dilakukan penghitungan nilai indeks untuk masing-masing dimensi

$$Dimensi_i = \sum Bs_{ij} \times X_{ij}$$

$$IPKLH = \sum Dimensi_i \times \frac{1}{n}$$

Dimana :

X = Nilai indikator

i = Banyaknya jumlah dimensi (1, 2, ..., n)

j = Banyaknya jumlah indikator pada masing – masing dimensi

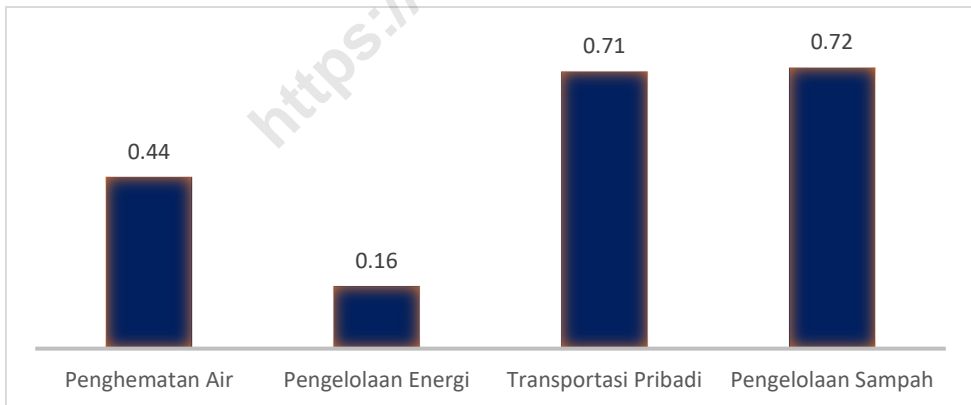
BAB IV

INDEKS PERILAKU KETIDAKPEDULIAN LINGKUNGAN HIDUP (IPKLH)

4.1 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup di Indonesia

Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) berkisar dari 0 hingga 1. Nilai IPKLH yang semakin besar (mendekati 1) menunjukkan semakin tingginya tingkat ketidakpedulian lingkungan di wilayah tersebut sedangkan semakin kecil nilai IPKLH (mendekati 0) menunjukkan semakin rendah tingkat ketidakpedulian (semakin peduli) lingkungan di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dijelaskan, diperoleh IPKLH Indonesia pada tahun 2017 sebesar 0,51. Provinsi dengan nilai IPKLH tertinggi ditempati oleh Aceh dengan nilai IPKLH sebesar 0.55 dan nilai IPKLH terendah ditempati oleh NTT dengan nilai IPKLH sebesar 0,41.

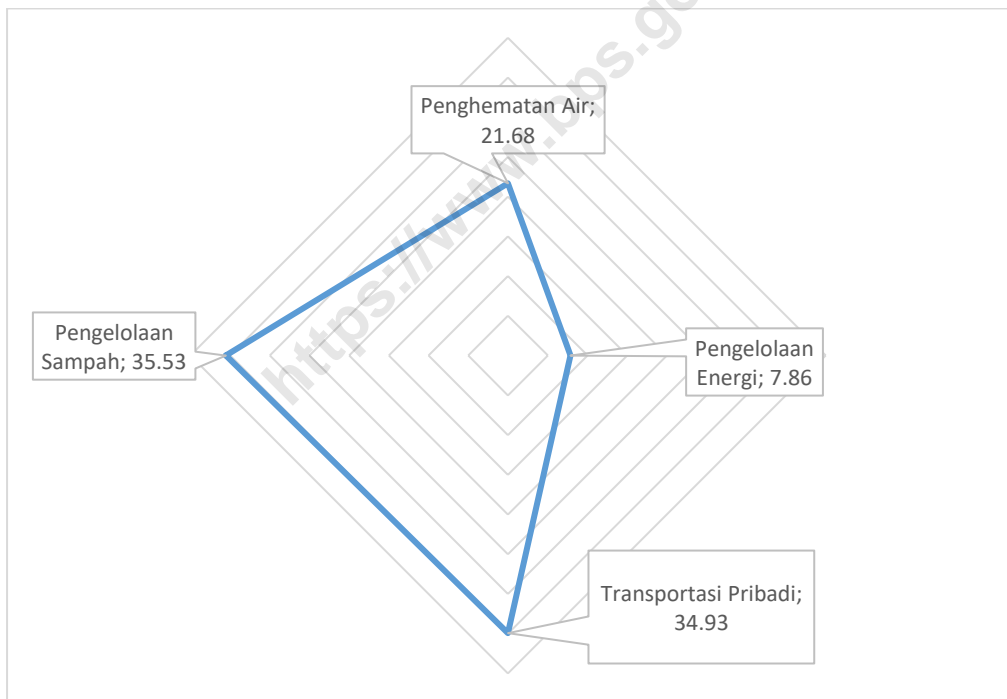
Gambar 4.1 Nilai Indeks Berdasarkan Dimensi Penyusun IPKLH di Indonesia



Berdasarkan dimensi penyusunnya, Dimensi pengelolaan Energi memiliki nilai Indeks yang paling kecil yaitu sebesar 0,16, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan energi di Indonesia bisa dikatakan tergolong baik. Sementara dimensi yang memiliki nilai indeks paling besar yaitu pengelolaan sampah sebesar 0,72, hal ini menunjukkan bahwa tingkat

ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah di Indonesia tergolong tinggi. *Share* yang diberikan oleh masing-masing dimensi sejalan dengan nilai indeks yang dihasilkan masing-masing dimensi penyusun IPKLH. *Share* terbesar terhadap perilaku tidak peduli lingkungan berasal dari pengelolaan sampah yaitu sebesar 35,53 persen dan *share* paling kecil terhadap perilaku tidak peduli lingkungan berasal dari pengelolaan energi sebesar 7,86 persen. Tingginya *share* dari dimensi pengelolaan sampah menunjukkan dimensi tersebut memberikan sumbangan besar terhadap tingginya tingkat ketidakpedulian suatu daerah terhadap lingkungan.

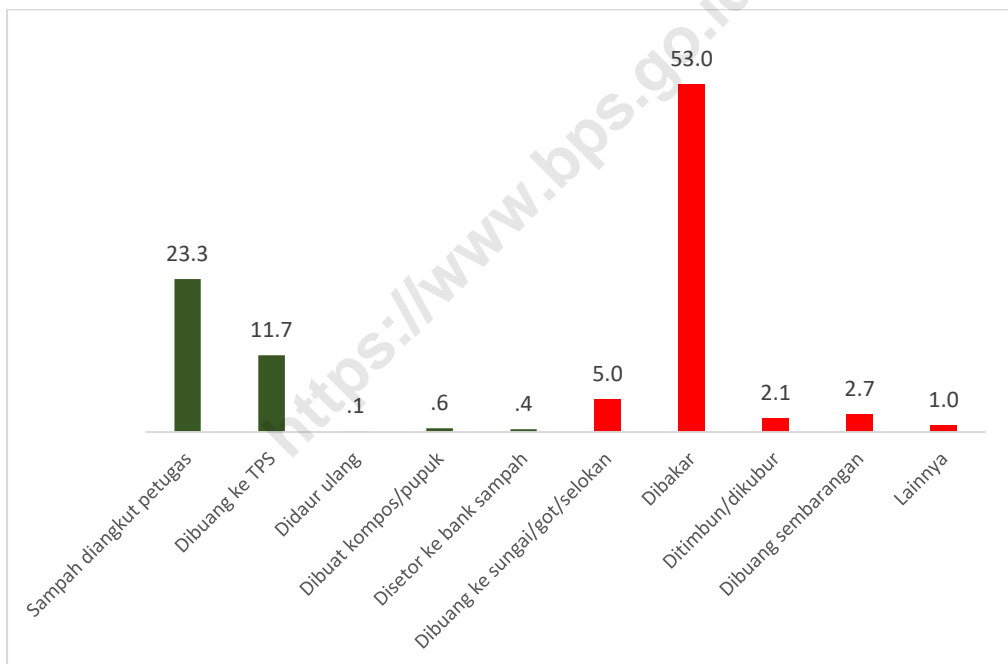
Gambar 4.2 *Share* Dimensi Penyusun IPKLH di Indonesia, 2017



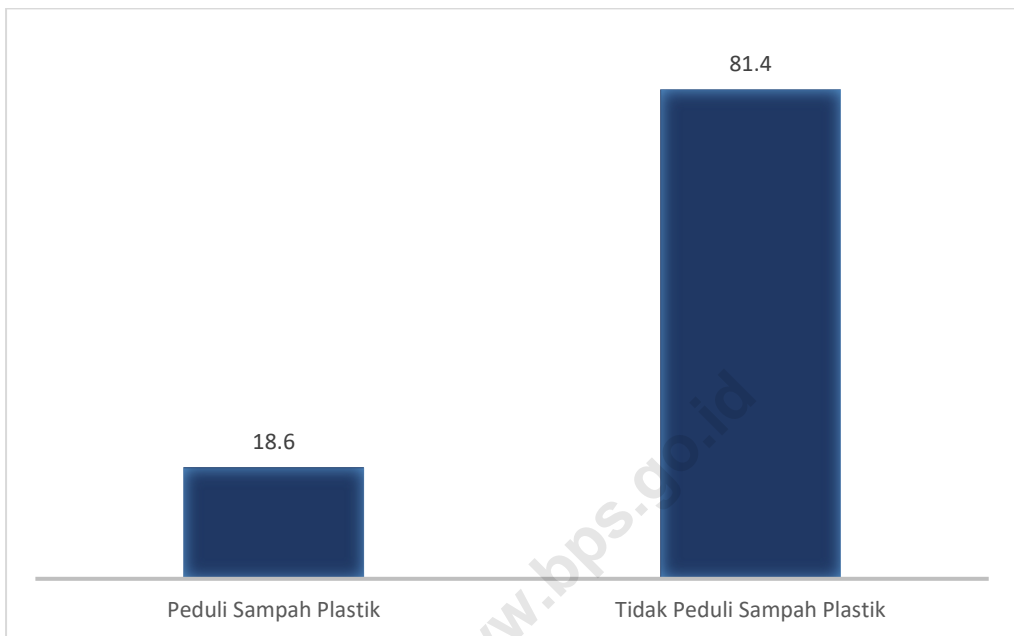
Tingginya tingkat ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah ditunjukkan dari perilaku rumah tangga di Indonesia mengenai penanganan terhadap pengelolaan sampah dan membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja untuk mengurangi sampah plastik. Berdasarkan gambar 4.3 Lebih dari separuh rumah tangga di Indonesia menggunakan cara yang tidak

ramah lingkungan ketika melakukan pengelolaan terhadap sampah, seperti membakar sampah (53%) yang akan menimbulkan polusi udara ataupun membuang sampah ke sungai/selokan (5%) dan sembarangan tempat (2.7%). Selain itu, untuk mengurangi sampah plastik dengan cara membawa tas belanja sendiri masih sedikit dilakukan oleh rumah tangga di Indonesia. Tercatat sebanyak 81,4 persen rumah tangga di Indonesia yang jarang membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja.

Gambar 4.3 Persentase Rumah Tangga di Indonesia Berdasarkan Penanganan Sampah yang Paling Sering Dilakukan, 2017



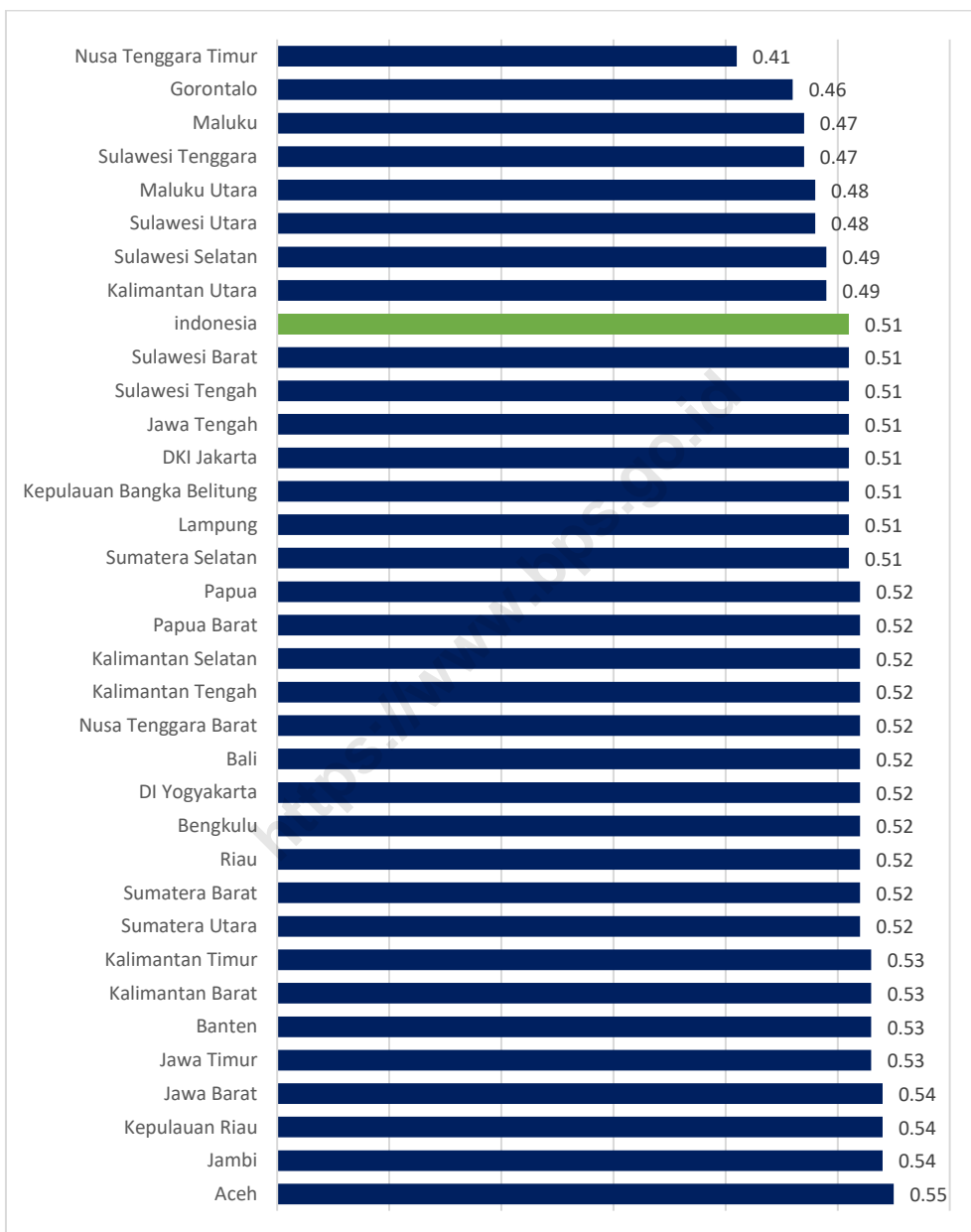
Gambar 4.4 Persentase Rumah Tangga di Indonesia Berdasarkan Kepedulian Terhadap Sampah Plastik Ketika Berbelanja, 2017



4.2 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia berdasarkan Provinsi

Berdasarkan Gambar 4.5 mengenai hasil IPLKH per Provinsi, hanya terdapat 8 Provinsi yang memiliki nilai IPLKH lebih kecil dari Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Jika dilihat dari hasil tersebut seluruh Provinsi yang memiliki nilai IPLKH lebih kecil dari Indonesia berasal dari wilayah timur Indonesia. Sementara sisanya ada 26 Provinsi yang memiliki nilai IPLKH lebih besar dari Indonesia sebagian besar berada di wilayah barat Indonesia (gambar4.5).

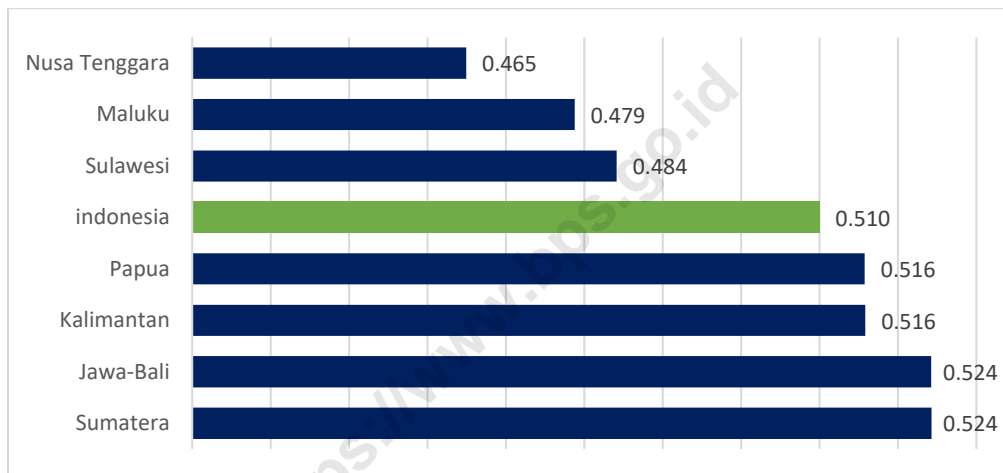
Gambar 4.5 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi, 2017



4.3 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia berdasarkan Pulau

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode PCA, maka diperoleh Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) 2017 berdasarkan Pulau di Indonesia sesuai dengan gambar 4.6

Gambar 4.6 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Pulau di Indonesia, 2017



Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan bahwa terdapat 4 pulau yang memiliki nilai indeks diatas rata-rata nilai indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup nasional (0,51) yaitu Papua, Kalimantan , Jawa-Bali, dan Sumatera. Keempat pulau tersebut didominasi oleh wilayah Indonesia di bagian barat. Sementara untuk nilai indeks yang lebih rendah dari angka nasional berada di bagian timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi.

Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup paling tinggi terdapat di Pulau Sumatera (0,524) dan yang paling rendah terdapat di Pulau Nusa Tenggara (0,465). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa perilaku ketidakpedulian di Pulau Sumatera lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya.

A. Pulau Sumatera

Provinsi Aceh memiliki nilai IPKLH tertinggi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 0,55 diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (0,54) dan dan Jambi (0,54). Sebaliknya nilai IPKLH terendah terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai IPKLH sebesar 0,51. Jika dilihat dari dimensi pembentuk IPKLH, Dimensi Transportasi Pribadi (0,78) menempati urutan pertama dengan nilai Indeks tertinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya, diikuti dengan dimensi pengelolaan sampah (0,75). Sebaliknya Dimensi Pengelolaan Energi memiliki nilai yang paling kecil (0,14). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ketidakpedulian lingkungan Hidup di Pulau Sumatera di dominasi mengenai transportasi pribadi dan pengelolaan sampah.

Tabel 4.1 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2017

Provinsi	IPKLH	Dimensi Penghematan Air	Dimensi Pengelolaan Energi	Dimensi Transportasi Pribadi	Dimensi Pengelolaan Sampah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,55	0,42	0,12	0,79	0,86
Sumatera Utara	0,52	0,42	0,17	0,71	0,77
Sumatera Barat	0,52	0,48	0,12	0,74	0,74
Riau	0,52	0,42	0,14	0,81	0,72
Jambi	0,54	0,43	0,17	0,81	0,75
Sumatera Selatan	0,51	0,39	0,15	0,76	0,73
Bengkulu	0,52	0,42	0,15	0,79	0,75
Lampung	0,51	0,39	0,11	0,74	0,80
Kepulauan Bangka Belitung	0,51	0,40	0,13	0,82	0,70
Kepulauan Riau	0,54	0,54	0,16	0,82	0,64
Sumatera	0,52	0,43	0,14	0,78	0,75

B. Pulau Jawa-Bali

Provinsi Jawa Barat memiliki nilai IPKLH tertinggi di Pulau Jawa-bali yaitu sebesar 0,54. Sebaliknya nilai IPKLH terendah terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta dengan nilai IPKLH sebesar 0,51. Jika dilihat dari dimensi pembentuk IPKLH, Dimensi Transportasi Pribadi (0,71) menempati

urutan pertama dengan nilai Indeks tertinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya, diikuti dengan dimensi Transportasi Pribadi (0,71). Sebaliknya Dimensi Pengelolaan Energi memiliki nilai yang paling kecil (0,14). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ketidakpedulian lingkungan Hidup di Pulau Jawa-Bali di dominasi mengenai transportasi pribadi dan pengelolaan sampah.

Tabel 4.2 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali, 2017

Provinsi	IPKLH	Dimensi Penghematan Air	Dimensi Pengelolaan Energi	Dimensi Transportasi Pribadi	Dimensi Pengelolaan Sampah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	0,51	0,53	0,36	0,70	0,46
Jawa Barat	0,54	0,53	0,23	0,67	0,72
Jawa Tengah	0,51	0,51	0,14	0,65	0,75
DI Yogyakarta	0,52	0,54	0,14	0,74	0,66
Jawa Timur	0,53	0,49	0,17	0,71	0,75
Banten	0,53	0,52	0,20	0,70	0,70
Bali	0,52	0,47	0,16	0,79	0,64
Jawa-Bali	0,52	0,51	0,20	0,71	0,67

C. Pulau Kalimantan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai IPKLH tertinggi di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 0,49. Sebaliknya nilai IPKLH terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dan Barat nilai IPKLH sebesar 0,53. Jika dilihat dari dimensi pembentuk IPKLH, Dimensi Transportasi Pribadi (0,77) menempati urutan pertama dengan nilai Indeks tertinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya, diikuti dengan Dimensi Pengelolaan Sampah (0,72). Sebaliknya Dimensi Pengelolaan Energi memiliki nilai yang paling kecil (0,13). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ketidakpedulian lingkungan Hidup di Pulau Kalimantan didominasi mengenai transportasi pribadi dan pengelolaan sampah.

Tabel 4.3 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan, 2017

Provinsi	IPKLH	Dimensi Penghematan Air	Dimensi Pengelolaan Energi	Dimensi Transportasi Pribadi	Dimensi Pengelolaan Sampah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Barat	0,53	0,39	0,14	0,71	0,88
Kalimantan Tengah	0,52	0,44	0,15	0,74	0,73
Kalimantan Selatan	0,52	0,47	0,11	0,77	0,72
Kalimantan Timur	0,53	0,50	0,15	0,84	0,61
Kalimantan Utara	0,49	0,41	0,11	0,80	0,65
Kalimantan	0,52	0,44	0,13	0,77	0,72

D. Pulau Sulawesi

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai IPKLH tertinggi di Pulau Sulawesi yaitu sebesar 0,49. Sebaliknya nilai IPKLH terendah terdapat di Provinsi Gorontalo dengan nilai IPKLH sebesar 0,46. Jika dilihat dari dimensi pembentuk IPKLH, Dimensi Pengelolaan Sampah (0,72) menempati urutan pertama dengan nilai Indeks tertinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya, diikuti dengan dimensi Transportasi Pribadi (0,67). Sebaliknya Dimensi Pengelolaan Energi memiliki nilai yang paling kecil (0,15). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ketidakpedulian lingkungan Hidup di Pulau Sulawesi didominasi mengenai pengelolaan sampah dan transportasi pribadi.

Tabel 4.4 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2017

Provinsi	IPKLH	Dimensi Penghematan Air	Dimensi Pengelolaan Energi	Dimensi Transportasi Pribadi	Dimensi Pengelolaan Sampah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	0,48	0,43	0,18	0,66	0,67
Sulawesi Tengah	0,51	0,45	0,14	0,73	0,72
Sulawesi Selatan	0,49	0,42	0,16	0,67	0,71
Sulawesi Tenggara	0,47	0,38	0,10	0,71	0,70
Gorontalo	0,46	0,39	0,15	0,63	0,69
Sulawesi Barat	0,51	0,43	0,17	0,62	0,80
Sulawesi	0,49	0,42	0,15	0,67	0,72

E. Pulau Nusa Tenggara

Pulau Nusa Tenggara hanya memiliki 2 Provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil yang diperoleh Pulau Nusa Tenggara memiliki nilai IPKLH sebesar 0,46 yang lebih kecil dibandingkan nilai IPKLH nasional. Akan tetapi, berdasarkan Provinsinya IPKLH terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai IPKLH 0,41 sekaligus menjadi nilai IPKLH terendah secara nasional. Sebaliknya nilai IPKLH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 0,52. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nasional. Jika dilihat dari dimensi pembentuk IPKLH, Dimensi Pengelolaan Sampah (0,77) menempati urutan pertama dengan nilai Indeks tertinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya, diikuti dengan dimensi Transportasi Pribadi (0,57). Sebaliknya Dimensi Pengelolaan Energi memiliki nilai yang paling kecil (0,15). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ketidakpedulian lingkungan Hidup di Pulau Nusa Tenggara di dominasi mengenai pengelolaan sampah dan transportasi pribadi.

Tabel 4.5 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Nusa Tenggara, 2017

Provinsi	IPKLH	Dimensi Penghematan Air	Dimensi Pengelolaan Energi	Dimensi Transportasi Pribadi	Dimensi Pengelolaan Sampah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nusa Tenggara Barat	0,52	0,50	0,16	0,64	0,79
Nusa Tenggara Timur	0,41	0,24	0,13	0,50	0,75
Nusa Tenggara	0,46	0,37	0,15	0,57	0,77

F. Pulau Maluku

Pulau maluku hanya memiliki 2 Provinsi yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Berdasarkan hasil yang diperoleh Pulau Maluku memiliki nilai IPKLH sebesar 0.48. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai IPKLH nasional. Nilai IPKLH Provinsi Maluku Utara memiliki nilai IPKLH yang lebih

tinggi 0,01 jika dibandingkan dengan Maluku yaitu sebesar 0,48. Jika dilihat dari dimensi pembentuk IPKLH, Dimensi Pengelolaan Sampah (0,79) menempati urutan pertama dengan nilai Indeks tertinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya, diikuti dengan dimensi Transportasi Pribadi (0,59). Sebaliknya Dimensi Pengelolaan Energi memiliki nilai yang paling kecil (0,15). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ketidakpedulian lingkungan Hidup di Pulau Maluku di dominasi mengenai pengelolaan sampah dan transportasi pribadi.

Tabel 4.6 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Maluku, 2017

Provinsi	IPKLH	Dimensi Penghematan Air	Dimensi Pengelolaan Energi	Dimensi Transportasi Pribadi	Dimensi Pengelolaan Sampah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Maluku	0,47	0,37	0,14	0,58	0,80
Maluku Utara	0,48	0,41	0,15	0,61	0,78
Maluku	0,48	0,39	0,15	0,59	0,79

G. Pulau Papua

Pulau Papua hanya memiliki 2 Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasarkan hasil yang diperoleh Pulau Papua memiliki nilai IPKLH sebesar 0,52 yang lebih besar dibandingkan nilai IPKLH nasional. Provinsi di Pualau Papua memiliki nilai IPKLH yang sama besar yaitu 0,52 baik untuk Provinsi Papua maupun Papua Barat. Jika dilihat dari dimensi pembentuk IPKLH, Dimensi Pengelolaan Sampah (0,74) menempati urutan pertama dengan nilai Indeks tertinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya, diikuti dengan dimensi Transportasi Pribadi (0,63). Sebaliknya Dimensi Pengelolaan Energi memiliki nilai yang paling kecil (0,24). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ketidakpedulian lingkungan Hidup di Pulau Papua di dominasi mengenai pengelolaan sampah dan transportasi pribadi.

Tabel 4.7 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Menurut Provinsi di Pulau Papua, 2017

Provinsi	IPKLH	Dimensi Penghematan Air	Dimensi Pengelolaan Energi	Dimensi Transportasi Pribadi	Dimensi Pengelolaan Sampah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Papua Barat	0,52	0,44	0,18	0,68	0,76
Papua	0,52	0,44	0,31	0,58	0,73
Papua	0,52	0,44	0,24	0,63	0,74

4.4 Hasil Kajian Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup

Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) digunakan sebagai dasar dalam beberapa penelitian. Penelitian-penelitian tersebut mengkaji IPKLH secara lebih dalam seperti menghitung IPKLH dengan multidimensi dan menghubungkan IPKLH dengan kondisi social ekonomi wilayah. Berikut merupakan beberapa penelitian yang mengkaji IPKLH secara lebih dalam.

A. Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Multidimensi dengan Metode Alkile-Foster (Analisis Data Susenas Modul Hansos 2017)

Perilaku masyarakat dan pilihan-pilihan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari apa yang dimakan sampai bagaimana ke tempat bekerja atau bagaimana mencuci pakaian, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, kepedulian penduduk terhadap lingkungan hidup perlu dicermati agar kebijakan pemerintah bisa terfokus pada perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan kepedulian lingkungan hidup. Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Multidimensi (IPKLHM) adalah cara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat kondisi perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup multidimensi rumah tangga tahun 2017

dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Hansos 2017 (Susenas MH 2017) menggunakan metode Alkire Foster.

Hasil penelitian ini menunjukkan 40,54 persen rumah tangga berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi dengan rata-rata ketidakpedulian 40,33 persen indikator (tidak peduli 6-7 indikator dari 17 indikator). Berdasarkan wilayah, Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai IPKLHM tertinggi dan Provinsi NTT memiliki nilai IPKLHM terendah, namun jika dilihat berdasarkan kontribusi terhadap pembentukan IPKLHM Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memberikan kontribusi mencapai 46,83 persen. Menurut dimensi penyusun IPKLHM Indonesia, dimensi pengelolaan sampah memberikan kontribusi terbesar mencapai 33,97 persen dan berdasarkan indikator penyusunnya, perilaku tidak menggunakan kembali air bekas, tidak mengurangi penggunaan kendaraan, tidak melakukan pemilahan sampah, tidak menggunakan angkutan umum atau kendaraan tidak bermotor, dan tidak membawa tas belanja sendiri memberikan kontribusi sebesar 58,32 persen.

B. Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah terhadap Perilaku Ketidakpedulian Pengelolaan Sampah

Pertumbuhan penduduk yang pesat baik dari jumlah maupun kualitas memicu kegiatan perekonomian yang secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan berbanding lurus dengan konsumsi barang dan jasa, yang berdampak pada peningkatan timbulan sampah. Pada 2015, Indonesia menempati posisi kedua penyumbang sampah terbesar setelah RRT. Menurut Perpres 97/2017 target penanganan sampah tahun 2017 sebesar 72 persen sedangkan target pengurangan sampah rumah tangga sebesar 15 persen.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah dengan kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah yang diwakili oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan

PDRB perkapita. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif (regresi linier berganda) untuk melihat hubungan dan deskriptif variable untuk melihat perilaku pengelolaan sampah menurut wilayah.

Hasil yang didapat adalah terdapat hubungan antara perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah dengan IPM dan PDRB perkapita. Semakin baik kondisi sosial ekonomi suatu wilayah maka perilaku kepedulian pengelolaan sampahnya semakin baik. Kelompok provinsi dengan IPM dan PDRB perkapita tinggi cenderung berkelompok pada nilai IPKPS rendah, begitupun sebaliknya. Dari hasil agregasi indikator penyusun IPKPS dari sisi penanganan sampah pada dua kelompok wilayah, didapatkan bahwa 70 persen rumah tangga pada kelompok provinsi bukan prioritas paling sering membuang sampah dengan cara diangkut petugas atau membawa langsung ke TPS. Namun disisi lain lebih dari 60 persen rumah tangga pada kelompok prioritas tinggi masih membakar sampah sebagai upaya mengurangi timbulan sampah.

C. Karakteristik Rumah Tangga yang Mempengaruhi Indeks Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) Hasil Susenas Modul Hansos 2017

Perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup merupakan salah satu ulah manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Perilaku mengurangi tas plastik dalam berbelanja, menggunakan lampu hemat energi di rumah, mengurangi polusi udara dengan mempertimbangkan membeli transportasi yang ramah lingkungan dan tidak membiarkan air mengalir saat tidak digunakan merupakan contoh bentuk kepedulian terhadap lingkungan. IPKLH hasil Susenas Modul Hansos 2017 merupakan alat ukur yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat perilaku ketidakpedulian suatu wilayah terhadap lingkungan hidup. Tingkat perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup ini terbatas pada perilaku rumah tangga mengenai

pengelolaan air, penggunaan transportasi, penggunaan energi, pengelolaan sampah pada unit analisis wilayah provinsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik rumah tangga suatu wilayah yang mempengaruhi perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup. Metode yang digunakan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan data Susenas Modul Hansos 2017 dengan responden Kepala Rumah Tangga yang mewakili karakteristik rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan α 0,05 dari delapan variabel yang diduga mempengaruhi perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup terdapat, empat yang signifikan. Empat variabel tersebut adalah X_3 (Persentase KRT pada kelompok umur 18-65 tahun), X_6 (Persentase KRT yang bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama), X_7 (Rata-rata pertanyaan pengetahuan terhadap lingkungan hidup yang dijawab benar oleh rumah tangga) dan X_8 (Persentase rumah tangga yang berpartisipasi sering dan selalu terkait lingkungan hidup seperti kerja bakti).

D. Analisis Perilaku Ketidakpedulian Terhadap Lingkungan Hidup Antara Wilayah Barat dan Timur Indonesia

Masalah lingkungan hidup di Indonesia dan dunia semakin penting untuk segera dicari upaya penyelesaiannya. Masyarakat Indonesia yang majemuk tinggal diberbagai pulau-pulau baik besar maupun kecil di Indonesia dan berasal dari lebih 500 suku memunculkan perilaku yang sangat bervariasi, tidak terkecuali perilaku tidak peduli terhadap lingkungan. Salah satu survei yang menunjukkan ketidakpedulian lingkungan hidup dengan ukuran Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) Indonesia adalah Susenas Modul Hansos 2017. Hasil penghitungan Mardiyah, 2018 didapatkan bahwa IPKLH 2017 Indonesia adalah 0,51, yang menunjukkan bahwa tingkat ketidakpedulian rumah tangga di Indonesia sebesar 0,51 atau

lebih dari separuhnya tidak peduli terhadap lingkungan. Rata-rata IPKLH 2017 antar provinsi berkisar antara 0,41 hingga 0,55.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan utama yang ingin dibahas adalah apakah ada perbedaan IPKLH di wilayah Indonesia Bagian Barat yang diwakili oleh pulau Sumatera, Jawa dan Bali dengan IPKLH di wilayah Indonesia Bagian Timur yang diwakili oleh pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua. Dilakukan Uji Mann-Whitney untuk melihat perbedaan antara dua kawasan tersebut. Hasil uji didapatkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,008. Nilai signifikansi 0,008 lebih kecil dibandingkan dengan selang kepercayaan yang ditetapkan yaitu 0,05 artinya bahwa rata-rata IPKLH Wilayah Barat Indonesia tidak sama dengan rata-rata IPKLH Wilayah Timur Indonesia. Atau dengan kata lain, perbedaan wilayah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai IPKLH.

DAFTAR PUSTAKA

- Andianti, Riska. (2018). *“Karakteristik Rumah Tangga yang Mempengaruhi Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH)”*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS. (2017). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahanan Sosial*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kutanegara, Pande Made, dkk. (2014). *“Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- OECD. (2008). *Hanbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Eropa: European Commission.
- _____. (2008). *Houshold Survey on Environmental Attitudes and Behaviour: Data Corroboration*. Eropa: European Commission.
- Purba, Winda Sartika. (2018). *“Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Multidimensi dengan Metode Alkile Foster (Analisis Data Susenas Modul Hansos 2017)”*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Safitri, Pramudya Ajeng. (2018). *“Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah terhadap Perilaku Ketidakpedulian Pengelolaan Sampah”*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- The Department for Environment, Food and Rural Affairs*. <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs> diakses tanggal 1 Februari 2018.
- Zulkifli, Mochamad. (2018). *“Analisis Perilaku Ketidakpedulian Terhadap Lingkungan Hidup Antara Wilayah Barat dan Timur”*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Share* Dimensi IPKLH 2017

Provinsi	Share per Dimensi Penyusun IPKLH				IPKLH
	Air	Energi	Transportasi	Sampah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	19,02	5,30	36,22	39,46	0,55
Sumatera Utara	20,59	8,04	34,19	37,17	0,52
Sumatera Barat	22,92	5,96	35,47	35,66	0,52
Riau	19,96	6,92	38,74	34,39	0,52
Jambi	19,91	7,92	37,39	34,77	0,54
Sumatera Selatan	19,32	7,22	37,39	36,07	0,51
Bengkulu	19,93	7,11	37,40	35,57	0,52
Lampung	19,06	5,58	36,20	39,17	0,51
Kepulauan Bangka Belitung	19,59	6,52	39,98	33,91	0,51
Kepulauan Riau	25,10	7,53	37,72	29,65	0,54
DKI Jakarta	25,88	17,33	34,13	22,65	0,51
Jawa Barat	24,59	10,64	31,16	33,61	0,54
Jawa Tengah	24,83	6,69	31,86	36,62	0,51
DI Yogyakarta	26,08	6,73	35,53	31,66	0,52
Jawa Timur	23,15	7,96	33,66	35,23	0,53
Banten	24,55	9,48	32,95	33,02	0,53
Bali	22,96	7,75	38,31	30,98	0,52
Nusa Tenggara Barat	23,67	7,78	30,69	37,86	0,52
Nusa Tenggara Timur	14,98	7,98	30,81	46,23	0,41
Kalimantan Barat	18,55	6,78	33,36	41,30	0,53
Kalimantan Tengah	21,33	7,11	36,06	35,50	0,52
Kalimantan Selatan	22,64	5,26	37,40	34,70	0,52
Kalimantan Timur	23,89	6,97	40,05	29,09	0,53
Kalimantan Utara	20,95	5,37	40,59	33,09	0,49
Sulawesi Utara	22,03	9,11	34,12	34,74	0,48
Sulawesi Tengah	22,02	7,05	35,82	35,11	0,51
Sulawesi Selatan	21,57	8,27	33,96	36,20	0,49
Sulawesi Tenggara	20,26	5,31	37,28	37,15	0,47
Gorontalo	21,01	7,88	33,89	37,22	0,46
Sulawesi Barat	21,33	8,57	30,75	39,34	0,51
Maluku	19,52	7,66	30,55	42,28	0,47
Maluku Utara	21,03	7,53	31,25	40,20	0,48
Papua Barat	21,50	8,69	33,00	36,80	0,52
Papua	21,51	14,98	28,26	35,25	0,52
INDONESIA	21,68	7,86	34,93	35,53	0,51

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. DR. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, Fax: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id>, Email: bpsdq@bps.go.id